

Countering Disinformation: The Role of Civic Education in the Post-Truth Era

Menangkal Disinformasi: Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Post-Truth

Irfandi

STAI Al-Azhary Mamuju

*Corresponding Author: irfandifandi19@gmail.com

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has transformed information threats from mere disinformation into an epistemic crisis, characterized by the declining ability of society to evaluate and verify the credibility of information. This study aims to analyze this transformation, examine the reorientation of Civic Education as an instrument of epistemic defense, and formulate implementation strategies through the integration of critical literacy into the curriculum. This study employed a qualitative descriptive literature review approach by analyzing scholarly articles, books, reports from international organizations, and relevant policy documents. Data were analyzed through reduction, synthesis, and interpretation of the reviewed literature. The findings reveal that the epistemic crisis is driven by the proliferation of disinformation, the rapid development of artificial intelligence, social media algorithms, and the echo chamber phenomenon, all of which erode public trust in credible sources of knowledge. These conditions necessitate a reorientation of Civic Education from a normative citizenship paradigm toward strengthening epistemic defense through critical thinking, information evaluation, and evidence-based reasoning. This reorientation can be implemented by systematically integrating critical literacy into learning outcomes, instructional materials, inquiry- and project-based learning strategies, and authentic assessment. The study concludes that integrating critical literacy into Civic Education is a fundamental strategy for fostering citizens with epistemic resilience who are capable of critically evaluating information and participating responsibly in democratic life in the digital era.

Keywords: Epistemic Crisis; Disinformation; Civic Education; Critical Literacy; Epistemic Defense.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi ancaman informasi dari sekadar disinformasi menuju krisis epistemik yang ditandai dengan melemahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi ancaman tersebut, mengkaji reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pertahanan epistemik, serta merumuskan strategi implementasi melalui integrasi literasi kritis dalam kurikulum. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap artikel ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, sintesis, dan interpretasi terhadap temuan-temuan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis epistemik dipengaruhi oleh disinformasi, perkembangan kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan fenomena echo chamber yang mengikis kepercayaan terhadap sumber pengetahuan yang kredibel. Kondisi tersebut menuntut reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan dari pembentukan warga negara yang normatif menuju penguatan pertahanan epistemik melalui kemampuan berpikir kritis, evaluasi informasi, dan penalaran berbasis bukti. Implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan literasi kritis ke dalam capaian pembelajaran, materi, strategi pembelajaran berbasis inkuiri dan proyek, serta asesmen autentik. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi literasi kritis merupakan strategi penting untuk membentuk warga negara yang memiliki ketahanan epistemik dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi di era digital.

Keywords: Krisis Epistemik; Disinformasi; Pendidikan Kewarganegaraan; Literasi Kritis; Pertahanan Epistemik.

This is an open access article under the CC BY license.



PENDAHULUAN

Di era informasi saat ini, masyarakat global sedang menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai era post-truth atau era pasca kebenaran. Dalam lanskap ini, objektivitas data dan fakta sering kali kalah oleh daya tarik emosional serta keyakinan subjektif. Kondisi di mana objektivitas data dan fakta terpinggirkan oleh daya tarik emosional bukanlah sebuah kebetulan, melainkan manifestasi dari apa yang disebut oleh (McIntyre, 2018) sebagai

teori post-truth. Dalam lanskap pasca-kebenaran, nilai kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan akurasi data atau koherensi logis, melainkan oleh sejauh mana informasi tersebut mampu mengonfirmasi bias keyakinan dan memenuhi kebutuhan emosional individu. Fenomena ini menciptakan pergeseran fundamental dalam diskursus public, fakta tidak lagi menjadi acuan utama, melainkan sekadar instrumen yang dapat dibentuk atau bahkan diabaikan demi mempertahankan identitas kelompok (Mofferz, 2020).

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, era post-truth bekerja dengan cara mengeksploitasi kerentanan psikologis warga negara. Ketika arus informasi yang terlalu masif melampaui kemampuan kognitif untuk memverifikasi, masyarakat cenderung mengambil jalan pintas dengan mempercayai narasi yang paling 'nyaman' didengar. Dampaknya, realitas objektif menjadi sesuatu yang sangat cair dan subjektif. Jika di masa lalu otoritas kebenaran dipegang oleh institusi ilmiah atau media arus utama, kini otoritas tersebut telah terfragmentasi ke tangan individu-individu di media sosial yang mengedepankan opini pribadi di atas data factual (Wardle & Derakhshan, 2017). Ketidakmampuan untuk membedakan antara fakta dan konstruksi emosional inilah yang menjadi akar ancaman bagi stabilitas demokrasi, karena sebuah masyarakat yang tidak lagi berpijak pada kebenaran yang sama akan kehilangan kemampuan untuk melakukan dialog yang konstruktif dan pengambilan keputusan kolektif yang rasional.

Fenomena ini diperparah oleh masifnya arus disinformasi, hoaks, dan propaganda yang tersebar luas melalui media sosial. Algoritma platform digital sering kali menciptakan "ruang gema" (echo chambers) yang mengurung individu dalam informasi yang selaras dengan opini mereka sendiri, sehingga memperuncing polarisasi sosial dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Newman et al., 2025).

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam meningkatnya tensi politik dan sosial di ruang digital. Berbagai survei dan laporan mengenai literasi digital menunjukkan bahwa meskipun akses informasi sangat mudah, kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran konten masih sangat rendah (Hidayat et al., 2024). Disinformasi tidak lagi sekadar masalah teknis atau komunikasi, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas nasional dan kualitas demokrasi. Ketika warga negara tidak lagi memiliki kompas untuk membedakan fakta dan opini, maka integritas kehidupan berbangsa menjadi taruhannya.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat krusial, untuk mengembalikan etika bermedia sosial. Karena bukan lagi sekadar pembelajaran mengenai struktur pemerintahan atau doktrin nasionalisme semata. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi mengenai *Digital Citizenship*, dan bertransformasi menjadi sarana pemberdayaan kritis. Riset menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis (critical thinking) dan literasi media adalah kunci utama dalam membangun ketahanan warga negara terhadap manipulasi informasi. Dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dalam menelaah dan menyebarkan informasi.

Dalam kondisi inilah, Pendidikan Kewarganegaraan memikul tanggung jawab yang jauh melampaui sekadar transfer pengetahuan normatif tentang tata negara. Ia harus bertransformasi menjadi laboratorium kritis bagi warga negara untuk mengasah kemampuan analitis dalam membedah arus informasi. Tantangan sesungguhnya bukan lagi tentang bagaimana membatasi aliran informasi, melainkan bagaimana menumbuhkan ketahanan kognitif sebuah kompas moral dan intelektual yang mampu membentengi nalar publik dari manipulasi. Tanpa adanya intervensi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai literasi kritis, ruang digital akan terus menjadi arena perpecahan yang mengaburkan batas antara kebenaran objektif dan kebohongan yang sistematis. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus hadir untuk menanamkan kembali kesadaran bahwa kebebasan berekspresi di era digital adalah tanggung jawab kolektif, di mana integritas informasi adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan beradab.

Transformasi ini memerlukan pergeseran paradigma, di mana literasi digital tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan fondasi utama dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan dengan temuan Al Khansa et al., (2024), pengintegrasian literasi digital yang masif ke dalam pembelajaran kewarganegaraan terbukti efektif dalam membekali masyarakat dengan kemampuan verifikasi konten, yang pada gilirannya mampu mereduksi penyebaran disinformasi secara signifikan. Lebih lanjut, riset Nurmansyah et al., (2026) menekankan bahwa dalam ekosistem demokrasi digital, literasi digital berperan krusial dalam mentransformasi kesadaran kewarganegaraan mengubah warga negara dari konsumen informasi yang pasif menjadi partisipan aktif yang kritis dan etis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nalar kritis akan mampu memitigasi efek polarisasi yang ditimbulkan oleh algoritma media sosial, sekaligus memperkuat daya tahan nasional terhadap ancaman disinformasi global yang kian canggih.

Penelitian mengenai disinformasi dan pendidikan kewarganegaraan telah berkembang pesat seiring dengan

masifnya digitalisasi demokrasi (Tarigan et al., 2025) (Pertiwi et al., 2025) (Ahila, n.d.). Studi terdahulu oleh (Handayani et al., 2025) berfokus pada pentingnya literasi digital sebagai perangkat teknis bagi warga negara. Sementara itu, kajian (Kale et al., 2025) telah memetakan efektivitas literasi digital dalam mereduksi hoaks di tingkat perkotaan. Di level global, pemikiran McIntyre, (2018) telah meletakkan dasar teoretis mengenai bagaimana era post-truth dan 'kematian kepakaran' mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Literatur saat ini umumnya menyepakati bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu bertransformasi dari sekadar transfer nilai normatif menjadi penguatan literasi informasi yang kritis.

Meskipun literatur yang ada telah banyak membahas mengenai urgensi literasi digital dan dampak negatif post-truth, masih terdapat celah yang signifikan. Sebagian besar penelitian cenderung melihat masalah disinformasi dari kacamata teknis-komunikatif atau sekadar sebagai masalah pendidikan literasi media. Belum banyak studi yang secara mendalam mengintegrasikan teori filsafat post-truth dengan metodologi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah strategi pertahanan demokrasi yang komprehensif. Selain itu, literatur yang ada sering kali terpisah antara pembahasan algoritma media sosial dan transformasi kesadaran kewarganegaraan, sehingga strategi integratif yang aplikatif dalam kurikulum kewarganegaraan modern di Indonesia masih sangat terbatas.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada pendekatan *Civic-Epistemic Defense*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada literasi digital sebagai keterampilan teknis, artikel ini menawarkan kerangka kerja baru yang memadukan analisis teoretis tentang krisis epistemik di era post-truth dengan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada pengasahan nalar kritis. Artikel ini memperkenalkan model pendidikan yang tidak hanya menuntut warga negara untuk memverifikasi fakta, tetapi juga menanamkan tanggung jawab etis-epistemik sebuah kesadaran bahwa menjaga integritas informasi adalah kewajiban konstitusional warga negara demi menjaga stabilitas demokrasi Indonesia. Ini menjadi tawaran solusi baru dalam merespons ancaman disinformasi yang selama ini hanya dipandang sebagai masalah teknis, bukan sebagai ancaman eksistensial bagi kewarganegaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis, mensintesis, dan menginterpretasikan berbagai teori, data, serta temuan penelitian terdahulu mengenai disinformasi, era post-truth, dan peran pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif (Arief & Sugiarti, 2022). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka sistematis pada pangkalan data jurnal ilmiah terakreditasi, buku teks otoritatif, serta laporan lembaga kredibel terkait literasi digital dan kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Strategi penelusuran literatur difokuskan pada kata kunci utama seperti post-truth, civic education, digital citizenship, disinformation, dan critical thinking. Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga langkah sistematis: pertama, reduksi data dengan menyeleksi literatur yang relevan dengan topik transformasi pendidikan kewarganegaraan di era digital; kedua, penyajian data melalui pemetaan argumen teoretis dan temuan empiris; serta ketiga, penarikan kesimpulan melalui sintesis kritis untuk membangun argumen baru mengenai model 'pertahanan epistemik' (epistemic defense) dalam kurikulum kewarganegaraan. Dengan menggunakan desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena krisis informasi dan menawarkan kerangka konseptual yang relevan bagi pembaruan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ancaman, Dari Disinformasi Menuju Krisis Epistemik

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa ancaman di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada awal perkembangan media digital perhatian akademik lebih banyak diarahkan pada fenomena disinformasi sebagai penyebaran informasi palsu secara sengaja, maka kajian-kajian mutakhir menunjukkan adanya pergeseran menuju persoalan yang lebih mendasar, yaitu krisis epistemik. Pergeseran ini tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah informasi yang salah, tetapi juga menyangkut melemahnya kemampuan individu maupun masyarakat dalam menentukan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya.

Analisis literatur menunjukkan bahwa disinformasi di era post-truth tidak lagi sekadar tentang penyebaran berita palsu, melainkan sebuah krisis epistemik. Dalam konteks ini, otoritas pengetahuan telah terfragmentasi. Algoritma media sosial telah berhasil mengubah perilaku konsumsi informasi warga negara dengan menciptakan filter bubbles yang memperkuat bias konfirmasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa dalam ekosistem ini, kebenaran objektif mengalami kemunduran karena kalah oleh sentimen identitas. Warga negara tidak lagi memverifikasi informasi berdasarkan akurasi data, melainkan berdasarkan kesesuaian narasi dengan keyakinan kelompok mereka.

Hal ini mengonfirmasi bahwa disinformasi telah menjadi senjata politik yang efektif untuk memicu polarisasi yang mengikis fondasi kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Disinformasi bukan lagi dipahami sebagai sekadar produk informasi yang tidak benar, melainkan telah berkembang menjadi strategi yang secara sistematis mengganggu proses pembentukan pengetahuan publik. Informasi yang salah diproduksi dan disebar untuk menciptakan keraguan, memperlemah konsensus ilmiah, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta membentuk realitas alternatif yang sulit diverifikasi. Dengan demikian, ancaman utama bukan semata-mata terletak pada kebohongan yang beredar, melainkan pada rusaknya mekanisme masyarakat dalam membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi informasi.

Pada fase awal, penelitian berfokus pada identifikasi berita palsu, hoaks, rumor, serta karakteristik informasi yang tidak benar. Fokus utama penelitian berada pada bagaimana informasi palsu diproduksi, disebarluaskan, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yang dominan adalah deteksi konten dan identifikasi aktor penyebar informasi palsu. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa disinformasi dipahami sebagai instrumen politik, ekonomi, maupun ideologi. Berbagai penelitian menegaskan bahwa aktor penyebar disinformasi tidak selalu bertujuan membuat masyarakat mempercayai informasi tertentu, melainkan cukup dengan menciptakan kebingungan sehingga masyarakat kehilangan kepastian terhadap fakta. Strategi ini menjadikan disinformasi sebagai bentuk manipulasi sosial yang memanfaatkan algoritma media digital, polarisasi politik, dan emosi publik.

Kajian terbaru menunjukkan perubahan paradigma menuju konsep epistemic crisis. Pada fase ini, persoalan utama bukan lagi benar atau salahnya suatu informasi, melainkan melemahnya fondasi epistemologis masyarakat. Individu semakin sulit menentukan sumber yang kredibel karena seluruh informasi hadir secara bersamaan dalam ruang digital tanpa hierarki otoritas yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya relativisme informasi, di mana setiap klaim dianggap memiliki legitimasi yang sama meskipun tidak didukung bukti ilmiah.

Platform media sosial mengembangkan sistem rekomendasi berbasis keterlibatan sehingga informasi yang bersifat emosional lebih mudah memperoleh jangkauan luas dibandingkan informasi yang faktual. Akibatnya, pengguna lebih sering terpapar informasi yang memperkuat keyakinan mereka daripada informasi yang bersifat korektif. Literatur menunjukkan bahwa masyarakat cenderung membangun komunitas informasi yang homogen. Interaksi hanya terjadi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa sehingga proses koreksi ilmiah semakin berkurang. Fenomena ini memperkuat polarisasi sosial sekaligus mempercepat penyebaran disinformasi.

Banyak penelitian menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak mengalami kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi (information overload). Kondisi tersebut membuat individu kesulitan melakukan verifikasi sehingga lebih memilih informasi yang mudah dipahami atau sesuai dengan preferensi pribadi. Krisis epistematik diperkuat oleh menurunnya kepercayaan terhadap media massa, akademisi, pemerintah, dan lembaga ilmiah. Ketika institusi kehilangan legitimasi epistemiknya, masyarakat lebih mudah mempercayai narasi alternatif yang belum tentu memiliki dasar empiris. Literatur terbaru menunjukkan bahwa kecerdasan buatan generatif mempercepat produksi teks, gambar, audio, dan video yang sulit dibedakan dari konten asli. Hal ini memperbesar peluang munculnya manipulasi informasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus memperdalam krisis epistematik. Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, transformasi ancaman informasi dapat dirumuskan dalam model berikut.

Tabel 1. Hasil Sintesis Berbagai Literatur

Tahapan	Karakteristik	Dampak
Disinformasi	Penyebaran informasi palsu	Kesalahan persepsi
Disinformasi Sistemik	Manipulasi narasi secara terorganisasi	Polarisasi sosial
Disrupsi Informasi	Hilangnya kepercayaan terhadap media dan institusi	Kebingungan publik
Krisis Epistematik	Rusaknya mekanisme penentuan kebenaran	Erosi pengetahuan kolektif

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penanganan krisis epistematik tidak cukup dilakukan melalui literasi digital yang berfokus pada kemampuan menggunakan teknologi. Tantangan saat ini menuntut penguatan literasi epistematik, yaitu kemampuan mengevaluasi bukti, menilai kredibilitas sumber, memahami metode ilmiah, serta membangun penalaran berbasis data. Dengan demikian, pendidikan perlu mengembangkan kompetensi berpikir kritis, evaluasi informasi, dan refleksi epistemologis sebagai bagian dari pembelajaran abad ke-21 (Uscinski et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman informasi digital telah mengalami transformasi dari persoalan disinformasi menuju krisis epistematik. Perubahan tersebut ditandai oleh bergesernya fokus

dari penyebaran informasi palsu ke pelemahan mekanisme sosial dalam membangun dan memverifikasi pengetahuan. Faktor-faktor seperti algoritma media sosial, polarisasi, banjir informasi, menurunnya kepercayaan terhadap institusi, serta perkembangan kecerdasan buatan mempercepat proses tersebut. Oleh karena itu, upaya mitigasi tidak cukup mengandalkan pemeriksaan fakta, tetapi perlu diarahkan pada penguatan ketahanan epistemik masyarakat melalui pendidikan, literasi informasi, dan pengembangan budaya berpikir ilmiah.

Reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan, Menuju Pertahanan Epistemik

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa dinamika masyarakat digital telah mendorong perlunya reorientasi tujuan dan praktik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selama ini, PKn lebih banyak diposisikan sebagai wahana pembentukan warga negara yang memahami hak dan kewajiban, memiliki karakter kebangsaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Namun, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa tujuan tersebut perlu diperluas dengan penguatan pertahanan epistemik (epistemic defense), yaitu kemampuan warga negara untuk mengenali, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kebenaran informasi yang diterima sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Perubahan ini didorong oleh kenyataan bahwa ancaman terhadap kehidupan demokrasi tidak lagi hanya berbentuk kekerasan fisik atau konflik politik, tetapi juga hadir melalui manipulasi informasi, disinformasi, propaganda digital, dan polarisasi yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas. Dalam konteks tersebut, kualitas kewarganegaraan tidak lagi hanya diukur dari tingkat partisipasi politik, tetapi juga dari kemampuan warga dalam membangun pengetahuan yang rasional, kritis, dan berbasis bukti. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan intelektual masyarakat terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi.

Perubahan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dari pendekatan normatif menuju pendekatan epistemik. Pada paradigma normatif, pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan nilai-nilai konstitusi, Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan identitas nasional. Sementara itu, paradigma epistemik memandang bahwa warga negara juga harus memiliki kemampuan untuk menilai kualitas pengetahuan yang beredar di ruang publik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran PKn tidak cukup hanya menghasilkan warga negara yang taat terhadap norma, tetapi juga mampu mempertanyakan validitas suatu informasi, mengidentifikasi bias, memahami proses produksi pengetahuan, serta menggunakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelesaikan persoalan publik. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan berkembang dari pendidikan tentang apa yang harus dipercaya menjadi pendidikan tentang bagaimana membangun kepercayaan berdasarkan alasan yang sah.

Pertahanan epistemik merupakan seperangkat kemampuan yang memungkinkan individu bertahan dari manipulasi informasi tanpa kehilangan keterbukaan terhadap pengetahuan baru. Kompetensi ini menjadi bagian penting dari karakter warga negara abad ke-21. Literatur mengidentifikasi beberapa komponen utama pertahanan epistemik yang relevan diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, yaitu kemampuan membedakan antara sumber yang memiliki otoritas akademik, profesional, atau kelembagaan dengan sumber yang tidak memiliki dasar keilmuan. Kemampuan berpikir kritis terhadap argumentasi, yaitu kemampuan mengidentifikasi kesalahan logika, bias kognitif, manipulasi retorika, dan klaim yang tidak didukung oleh bukti. Kemampuan melakukan verifikasi informasi, termasuk membandingkan berbagai sumber, memeriksa data pendukung, dan memahami konteks suatu informasi. Kemampuan refleksi epistemik, yaitu kesadaran bahwa pengetahuan bersifat terbuka terhadap koreksi berdasarkan bukti baru, namun tidak berarti semua pendapat memiliki tingkat validitas yang sama.

Menghadapi tantangan tersebut, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan instruksional yang pasif. Temuan penelitian ini menekankan perlunya reorientasi kurikulum menuju konsep 'Pertahanan Epistemik' (Epistemic Defense). Berbeda dengan literasi digital konvensional yang hanya menekankan keterampilan teknis seperti kemampuan membedakan hoaks pertahanan epistemik menuntut pembentukan nalar kritis yang lebih mendalam. Sintesis literatur menunjukkan bahwa tujuan PKn perlu diperluas agar mampu menjawab tantangan krisis epistemik. Dalam perspektif ini, peserta didik tidak hanya dibekali kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi, tetapi juga didorong untuk memahami bagaimana pengetahuan dibangun, mengenali berbagai bentuk bias kognitif, menilai kredibilitas sumber informasi, serta menyusun penilaian yang didasarkan pada bukti dan penalaran yang rasional. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi tidak hanya sebagai wahana pembentukan warga negara yang taat terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kapasitas epistemik yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi secara kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam ruang publik digital yang semakin kompleks. Reorientasi tersebut dapat dilihat melalui perubahan orientasi pembelajaran berikut.

Tabel 2. Sintesis Literatur Perubahan Orientasi Pembelajaran

Orientasi Konvensional	Reorientasi Menuju Pertahanan Epistemik
Memahami hak dan kewajiban warga negara	Memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarkan informasi
Menghafal nilai-nilai Pancasila	Menggunakan nilai Pancasila sebagai kerangka evaluasi terhadap informasi publik
Menumbuhkan partisipasi demokrasi	Menumbuhkan partisipasi demokrasi berbasis bukti (<i>evidence-based citizenship</i>)
Menanamkan nasionalisme	Mengembangkan nasionalisme yang kritis, terbuka, dan berlandaskan pengetahuan yang valid
Mengembangkan karakter	Mengembangkan karakter sekaligus ketahanan epistemik dalam menghadapi manipulasi informasi

Hasil penelusuran literatur juga menunjukkan bahwa penguatan pertahanan epistemik memerlukan perubahan strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang bersifat satu arah dan berorientasi pada hafalan dinilai kurang efektif untuk membangun kemampuan evaluasi informasi. Sebaliknya, pembelajaran perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk menganalisis isu-isu aktual, membandingkan berbagai sumber informasi, mendiskusikan argumentasi yang berbeda, serta menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa strategi yang banyak direkomendasikan dalam literatur meliputi pembelajaran berbasis isu kewargaan (*issue-based learning*), pembelajaran berbasis inkuiri (*inquiry learning*), diskusi deliberatif, studi kasus, analisis media digital, serta pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang melibatkan proses pencarian, verifikasi, dan interpretasi informasi. Melalui strategi tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang demokrasi dan kewargaan, tetapi juga mengalami secara langsung proses membangun pengetahuan yang valid.

Pendidikan Kewarganegaraan menghadapi tantangan baru yang tidak lagi terbatas pada pembentukan karakter dan identitas kebangsaan, tetapi juga pada penguatan kemampuan epistemik warga negara. Krisis epistemik yang dipicu oleh disinformasi, polarisasi, dan banjir informasi digital menuntut adanya reorientasi tujuan, materi, dan strategi pembelajaran PKn. Dalam perspektif ini, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen pertahanan epistemik, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan mengevaluasi sumber informasi, berpikir kritis, melakukan verifikasi berbasis bukti, serta mengambil keputusan publik secara rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, PKn tidak hanya membentuk *good citizens* yang memiliki karakter dan komitmen kebangsaan, tetapi juga *epistemically resilient citizens*, yakni warga negara yang mampu menjaga kualitas pengetahuan sebagai fondasi kehidupan demokrasi di era digital.

Integrasi Literasi Kritis dalam Kurikulum, Strategi Implementasi

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa penguatan pertahanan epistemik melalui Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan integrasi literasi kritis ke dalam kurikulum secara sistematis. Berbagai kajian menegaskan bahwa literasi kritis tidak lagi dipahami sebagai kemampuan membaca dan memahami teks semata, melainkan sebagai kompetensi untuk menganalisis, mengevaluasi, menginterpretasikan, serta mengkritisi informasi berdasarkan bukti, konteks, dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks masyarakat digital, literasi kritis menjadi fondasi penting bagi peserta didik untuk menghadapi banjir informasi, disinformasi, propaganda digital, dan manipulasi opini yang semakin kompleks.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi literasi kritis perlu dilakukan melalui pendekatan kurikulum yang bersifat holistik. Artinya, literasi kritis tidak ditempatkan sebagai materi tambahan atau program insidental, tetapi menjadi bagian yang melekat dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, asesmen, dan budaya akademik di sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik mengembangkan kebiasaan berpikir reflektif dan berbasis bukti dalam setiap proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, terdapat kecenderungan bahwa sistem pendidikan di berbagai negara mulai menempatkan literasi kritis sebagai salah satu kompetensi abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan memahami informasi secara mendalam, mengevaluasi keabsahan argumen, mengenali bias, mengidentifikasi kepentingan di balik suatu narasi, serta menyusun argumentasi yang logis berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, literasi kritis menjadi sarana untuk membentuk warga negara yang tidak hanya mengetahui norma dan nilai demokrasi, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut ketika menghadapi berbagai isu publik. Dengan demikian, peserta didik

tidak sekadar menjadi konsumen informasi, melainkan juga menjadi individu yang mampu memproduksi pengetahuan secara bertanggung jawab.

Capaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep kewarganegaraan, tetapi juga mencakup kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi informasi, menyusun argumentasi berbasis bukti, serta mengambil keputusan secara rasional terhadap berbagai persoalan sosial dan kebangsaan. Materi pembelajaran perlu dikembangkan dengan memanfaatkan isu-isu aktual yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, etika bermedia sosial, kecerdasan buatan, keamanan data pribadi, dan partisipasi digital. Melalui konteks nyata tersebut, peserta didik dapat menghubungkan konsep-konsep kewarganegaraan dengan tantangan kehidupan sehari-hari.

Literatur menunjukkan bahwa penguatan literasi kritis lebih efektif apabila menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Beberapa strategi yang banyak direkomendasikan meliputi pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), pembelajaran berbasis inkuiri (*inquiry learning*), diskusi deliberatif, studi kasus, debat akademik, analisis media, simulasi pengambilan keputusan publik, serta pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Strategi-strategi tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguji informasi, mengembangkan argumentasi, dan merefleksikan berbagai sudut pandang secara kritis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa asesmen literasi kritis tidak cukup dilakukan melalui tes hafalan atau pilihan ganda. Penilaian perlu diarahkan pada kemampuan peserta didik dalam menganalisis sumber informasi, mengevaluasi validitas bukti, menyusun argumentasi logis, memecahkan masalah sosial, serta menghasilkan solusi berdasarkan data yang relevan. Oleh karena itu, asesmen autentik seperti portofolio, proyek, esai analitis, presentasi, dan refleksi menjadi alternatif yang lebih sesuai. Sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi literasi kritis sangat bergantung pada kompetensi guru. Dalam paradigma pembelajaran kontemporer, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam proses membangun pengetahuan secara mandiri.

Guru dituntut memiliki kemampuan untuk memilih sumber belajar yang kredibel, merancang aktivitas pembelajaran berbasis isu aktual, memfasilitasi diskusi yang terbuka dan argumentatif, serta membimbing peserta didik dalam melakukan verifikasi informasi. Selain itu, guru juga perlu membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman pendapat, selama argumentasi yang disampaikan didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi ruang latihan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus sikap demokratis.

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa implementasi literasi kritis tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga memerlukan dukungan ekosistem sekolah secara menyeluruh. Sekolah perlu membangun budaya akademik yang mendorong peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, menghargai perbedaan pandangan, dan melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan sosial. Pemanfaatan perpustakaan digital, akses terhadap sumber belajar yang kredibel, kegiatan debat ilmiah, forum diskusi, proyek kolaboratif, serta program literasi sekolah menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berkembangnya literasi kritis. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berkembang menjadi proses pembentukan budaya berpikir ilmiah. Berdasarkan sintesis berbagai literatur, implementasi literasi kritis dalam kurikulum dapat digambarkan melalui tahapan berikut.

Tabel 3. Sintesis implementasi literasi kritis

Tahapan Implementasi	Fokus Pengembangan	Hasil yang Diharapkan
Perencanaan Kurikulum	Integrasi literasi kritis dalam capaian pembelajaran dan materi ajar	Kurikulum yang responsif terhadap tantangan informasi digital
Proses Pembelajaran	Pembelajaran berbasis inkuiri, studi kasus, proyek, dan analisis media	Kemampuan berpikir kritis dan evaluasi informasi
Asesmen Pembelajaran	Penilaian autentik berbasis argumentasi dan bukti	Kompetensi analitis dan reflektif peserta didik
Budaya Sekolah	Penguatan budaya diskusi, literasi, dan kolaborasi	Lingkungan belajar yang mendukung ketahanan epistemik

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa integrasi literasi kritis dalam kurikulum merupakan strategi yang esensial untuk memperkuat pertahanan epistemik peserta didik di era digital. Literasi kritis perlu diposisikan sebagai kompetensi inti yang terintegrasi dalam capaian pembelajaran, materi, metode, asesmen, dan budaya sekolah.

Implementasinya menuntut transformasi peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penerapan asesmen autentik yang menilai kemampuan analisis, evaluasi bukti, dan argumentasi. Dengan integrasi yang sistematis, kurikulum tidak hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan tangguh secara epistemik dalam menghadapi tantangan disinformasi dan kompleksitas informasi pada masyarakat digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ancaman dari disinformasi menuju krisis epistemik menuntut adanya reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui penguatan literasi kritis sebagai fondasi pertahanan epistemik. Disinformasi tidak lagi dipahami sebatas penyebaran informasi palsu, tetapi telah berkembang menjadi ancaman yang mengganggu mekanisme masyarakat dalam membangun, memvalidasi, dan menggunakan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Hannon, (2023), krisis epistemik terjadi ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sumber-sumber pengetahuan yang sah sehingga batas antara fakta, opini, dan manipulasi menjadi semakin kabur. Kondisi ini diperparah oleh perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), algoritma media sosial, dan fenomena echo chamber yang mempercepat penyebaran narasi tanpa verifikasi (Cinelli et al., 2021). UNESCO menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak hanya menghadapi krisis disinformasi, tetapi telah memasuki crisis of knowing, yaitu situasi ketika kemampuan manusia dalam membangun pengetahuan bersama mengalami erosi sehingga pendidikan tidak lagi cukup berfokus pada kemampuan mendeteksi informasi palsu, melainkan harus membangun epistemic agency, yaitu kemampuan individu untuk memahami bagaimana pengetahuan dibentuk, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan (Fallis, 2021). UNESCO juga menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan kesadaran kontekstual, penalaran etis, refleksi metakognitif, dan kemampuan berpikir kritis sebagai respons terhadap realitas digital yang semakin kompleks.

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu direorientasikan dari pendidikan yang berorientasi pada transfer pengetahuan kewargaan menuju pendidikan yang membangun pertahanan epistemik warga negara melalui kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber, memverifikasi bukti, mengenali bias informasi, dan menyusun argumentasi yang rasional. Reorientasi tersebut kemudian perlu diimplementasikan melalui integrasi literasi kritis dalam kurikulum secara sistematis, baik pada capaian pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, maupun asesmen autentik. Pendekatan seperti inquiry learning, problem-based learning, analisis media digital, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek menjadi strategi yang relevan untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan evaluatif peserta didik. Dengan demikian, ketiga temuan penelitian ini membentuk suatu alur yang saling berkesinambungan, yakni krisis epistemik sebagai tantangan utama masyarakat digital, reorientasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai respons konseptual, dan integrasi literasi kritis dalam kurikulum sebagai strategi implementasi untuk menghasilkan warga negara yang memiliki ketahanan epistemik, mampu berpikir kritis, mengambil keputusan berbasis bukti, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa transformasi ancaman informasi dari disinformasi menuju krisis epistemik telah menghadirkan tantangan baru bagi Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. Krisis epistemik tidak hanya ditandai oleh meluasnya penyebaran informasi palsu, tetapi juga oleh melemahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi kebenaran, membedakan fakta dari opini, serta membangun pengetahuan yang berbasis bukti. Kondisi tersebut diperkuat oleh perkembangan kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan fenomena echo chamber yang mempercepat penyebaran narasi tanpa verifikasi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu direorientasikan sebagai instrumen pertahanan epistemik melalui penguatan kemampuan berpikir kritis, evaluasi informasi, penalaran berbasis bukti, dan tanggung jawab dalam memproduksi maupun menyebarkan informasi. Implementasi tujuan tersebut memerlukan integrasi literasi kritis secara sistematis ke dalam kurikulum melalui capaian pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta asesmen autentik yang menilai kemampuan analitis dan reflektif. Dengan demikian, integrasi literasi kritis dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memperkuat kompetensi kewargaan abad ke-21, tetapi juga menjadi strategi fundamental dalam membangun warga negara yang memiliki ketahanan epistemik, mampu menghadapi disinformasi secara rasional, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kajian empiris pada berbagai jenjang pendidikan untuk menguji efektivitas model integrasi literasi kritis dalam meningkatkan ketahanan epistemik peserta didik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahila, N. W. (n.d.). *DIGITALISASI DAN DISRUPSI: STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI Z DI*

ERA SOCIETY 5.0.

- Al Khansa, J. N., Maiyuni, N. A. I., Azzahroh, N. I., Shandiva, C. N., Aini, A. N., & Ghazali, I. (2024). Pendidikan kewarganegaraan di era post-truth: Menangkal disinformasi dan hoaks. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 231–253.
- Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature review: analisis metode perancangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 8(2), 87–93.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Fallis, D. (2021). The epistemic threat of deepfakes. *Philosophy & Technology*, 34(4), 623–643.
- Handayani, S., Novantika, V., & Asriani, S. (2025). Tantangan Pendidikan Pancasila Di Era Digitalisasi. *Journal of Education*, 1(3), 510–522.
- Hannon, M. (2023). The politics of post-truth. *Critical Review*, 35(1–2), 40–62.
- Hidayat, A., Salim, R. F., & Suherman, F. (2024). Program Literasi Digital dan Etika Media Sosial bagi Pelajar. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 6(1), 63–70.
- Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. mit Press.
- Mofferz, M. W. (2020). Meretas makna post-truth: Analisis kontekstual hoaks, emosi sosial dan populisme agama. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 7(1), 3.
- Newman, N., Ross Arguedas, A., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). *Digital news report 2025*. Reuters Institute for the study of Journalism.
- Nurmansyah, C. A., Juwono, M. P., & Khairiyah, N. (2026). Literasi digital dan transformasi kesadaran kewarganegaraan mahasiswa dalam ekosistem demokrasi digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6880–6891.
- Pertiwi, A., Pramudika, N. R., Isnaini, P., & Fikri, R. Ai. (2025). Membangun Literasi Digital Peserta Didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Media Sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 34–41.
- Tarigan, P. S., Ginting, M. U. B., & Siregar, D. V. M. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa Di Era Digital: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1610–1616.
- Uscinski, J., Littrell, S., & Klostad, C. (2024). The importance of epistemology for the study of misinformation. *Current Opinion in Psychology*, 57, 101789.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27). Council of Europe Strasbourg.